

SKRIPSI

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

ANDI NUR WAHYUNINGSIH



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANDI NUR WAHYUNINGSIH

A011171301



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

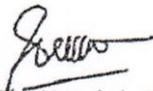
disusun dan diajukan oleh:

ANDI NUR WAHYUNINGSIH
A011171301

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 09 Februari 2021

Pembimbing 1



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP 19660717 199103 2 001

Pembimbing 2



Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.
NIP 19590303 198810 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

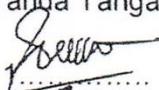
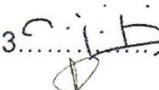
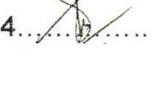
disusun dan diajukan oleh:

ANDI NUR WAHYUNINGSIH
A011171301

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 09 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

| No | Nama penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--|------------|--|
| 1 | Prof. Dr. Nursini. SE.,MA | Ketua |  |
| 2 | Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si | Sekretaris | 2.  |
| 3 | Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu SE., M.Si | Anggota | 3.  |
| 4 | Drs. A. Baso Siswadharma, M.Si | Anggota | 4.  |

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andi Nur Wahyuningsih**
Nomor Pokok : A011171301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 12 Februari 2021

Yang Menyatakan



(Andi Nur Wahyuningsih)

No. Pokok: A011171301

PRAKATA

Alhamdullillahirrabbi'lalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar"

Penulis bermaksud menyumbangkan konsep untuk menyikapi permasalahan pengangguran.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan skripsi ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Nursini, SE.,MA sebagai Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik (PA) dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S1, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Unhas atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S1 Ilmu Ekonomi Unhas dan kepada seluruh anggota tim penguji: Bapak Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu SE., M.Si dan Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si. yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi Unhas 2017 (Erudite), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada teman yang senantiasa setia menemani dan selalu ada dari masa mahasiswa baru hingga saat ini yaitu Adinda Asiah Minhikmah Alena Pituleng Yunus, kemudian kepada teman berbagi suka maupun duka semasa kuliah yaitu, Nurainun Wirfiana, Tiara Risang Ayu, Risna Zulfiana, Andi Maghfira Maulani, Nandarima Shasha Ismi, Sul Iman Syahrul,

Fandy Suryansyah, Fakrur Rozi M yang senantiasa membantu dan menemani penulis serta semangat dan doa yang tiada henti, serta Kak Ayu Lathifah Alfisyahrin yang selalu membantu menjawab pertanyaan seputar skripsi yang penulis tanyakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima Kasih penulis ucapkan juga kepada Devi Yolanda, Nurul Izzah Salsabila, Nur Afifah, Firdayanti Maulidia, Khusnul Khotimah, Tenriana Nur Qalbi, Andi Munisah Ramadhani, Maghfirah Dwi Putri, Arista Larasati, Firda Irianti, Muthia Amanah Arum, Tria Fidyah, Andi Dea Ihdinasari dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala canda tawa dan semangat yang kalian berikan.

Hal yang sama penulis ucapkan keluarga besar penulis khususnya kepada Kakak penulis, Andi Nur Alam Rezeki yang senantiasa dengan tulus menemani, mendukung serta memberi saran, nasehat dan arahan terbaik, begitupun Adik penulis Andi Nur Fahrul yang dengan tulus selalu memberikan motivasi, semangat dan turut mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan orang tua, Ayahanda Drs. La Sewa; dan Ibunda tercinta Rosnawati Toeng S.Ag, dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orang tua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dan juga mengajarkan berbagai hal tentang pentingnya pendidikan. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu 'alam.

Makassar, 12 Februari 2021

Andi Nur Wahyuningsih

ABSTRAK

ANDI NUR WAHYUNINGSIH, *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar* (Dibimbing oleh Nursini dan Bakhtiar Mustari)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, dan upah minimum berpengaruh negative terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Pengangguran, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum*

ABSTRACT

ANDI NUR WAHYUNINGSIH, Identification of Factors That Affect The Unemployment Rate In Makassar City (Guided by Nursini and Bakhtiar Mustari)

This study aims to find out how much influence capital expenditure, economic growth, human development index, and minimum wage on the unemployment rate in Makassar City.

The data used are secondary data obtained from BPS (Central Statistics Agency), BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency), and Makassar City Manpower Office. The analysis model used is multiple regression analysis.

The findings showed that the variable capital expenditure has no effect on the unemployment rate in Makassar City, while the variables of economic growth, human development index, and minimum wage affect the unemployment rate in Makassar City.

Keywords: *Unemployment, Capital Expenditure, Economic Growth, Human Development Index, and Minimum Wage*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 15 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| 2.1 Landasan Teoritis | 16 |
| 2.1.1 Pengertian dan Konsep Pengangguran | 16 |
| 2.1.2 Belanja Modal..... | 18 |
| 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi | 20 |
| 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia..... | 23 |
| 2.1.5 Upah..... | 24 |
| 2.1.6 Hubungan Belanja Modal dengan Pengangguran..... | 26 |
| 2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran | 27 |
| 2.1.8 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran | 27 |
| 2.1.7 Hubungan Upah dengan Pengangguran..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Tinjauan Empiris | 30 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 35 |
| 2.4 Hipotesis Penelitian | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 38 |
| 3.1 Ruang Lingkup Penelitian..... | 38 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 38 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 38 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 39 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 39 |
| 3.6 Uji Asumsi Klasik | 40 |
| 3.7 Pengujian Hipotesis..... | 41 |
| 3.8 Definisi Operasional | 47 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Variabel | 45 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Pengangguran | 47 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Belanja Modal..... | 48 |
| 4.1.3 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi | 49 |
| 4.1.4 Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia..... | 50 |
| 4.1.5 Gambaran Umum Upah Minimum | 52 |
| 4.2 Uji Asumsi Klasik | 52 |
| 4.3 Analisis Hasil Penelitian | 55 |
| 4.4 Pembahasan | 58 |
| 4.4.1. Analisis dan Implikasi Pengaruh Belanja Modal Pengangguran..... | 58 |
| 4.4.2. Analisis dan Implikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran..... | 59 |
| 4.4.3. Analisis dan Implikasi Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Pengangguran | 61 |
| 4.4.4. Analisis dan Implikasi Pengaruh Upah Minimum Pengangguran..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | 64 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5.1 Kesimpulan | 64 |
| 5.2 Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| LAMPIRAN..... | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Grafik 1.1 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2010-2019 | 3 |
| Grafik 1.2 Belanja Modal Kota Makassar 2010-2019 | 3 |
| Grafik 1.3 Kontribusi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2019 | 7 |
| Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2019 | 8 |
| Grafik 1.5 Upah Minimum 2010-2019 | 13 |
| Gambar 2.1 Kerangka konseptual | 40 |
| Gambar 4.1 Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Kota Makassar Tahun 2005-2019..... | 51 |
| Gambar 4.2 Gambaran Umum Belanja Modal Kota Makassar Tahun 2005-2019 | 52 |
| Gambar 4.3 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2005 2019 | 53 |
| Gambar 4.4 Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Tahun 2005-2019..... | 55 |
| Gambar 4.5 Gambaran Umum Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2005-2019 | 57 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1. Tingkat pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tahun 2010-2019 | 9 |
| Tabel 1.2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2010-2019 | 11 |
| Tabel 2.1. Matriks Tinjauan Empiris | 32 |
| Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Data | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

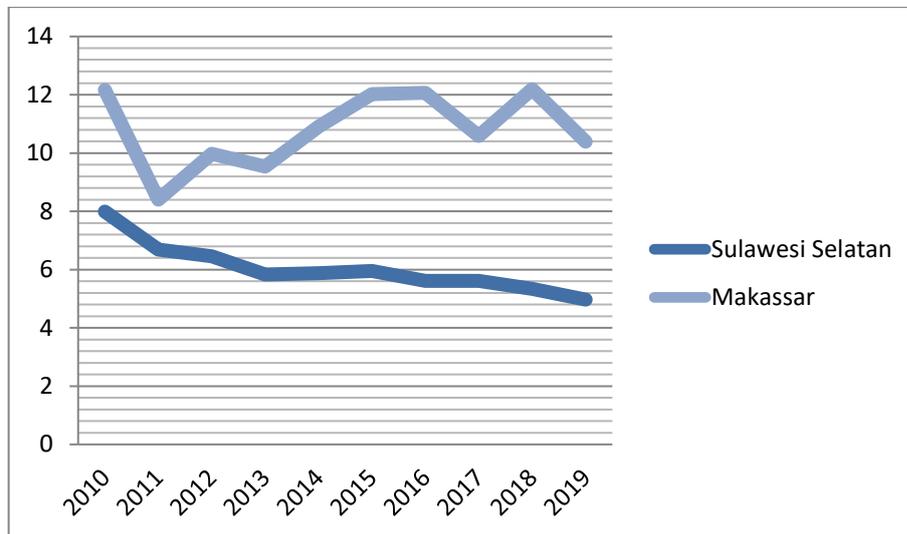
Pembangunan suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi, seperti halnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengurangan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Pada negara berkembang persoalan ekonomi yang kerap terjadi ialah tingginya tingkat pengangguran, tidak terkecuali negara Indonesia. Persoalan pengangguran yang dinilai kompleks sebab setiap tahunnya jumlah angkatan kerja terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk (Akhmad,2019), maka dari itu harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, sebab apabila masalah pengangguran tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menciptakan masalah baru seperti halnya kejahatan sosial. Dengan masalah tersebut maka diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah dengan tujuan ekonomi, yakni menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perbaikan pendapatan.

Dari berbagai penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, seperti halnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, Jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, Investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, upah minimum, serta beberapa faktor lainnya. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap beberapa faktor saja seperti halnya belanja modal yang merupakan aktivitas pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, yang kemudian hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut dapat menyerap tenaga kerja, dan

mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang sangat erat kaitannya sebab menjadi tolak ukur sejahteranya suatu wilayah dan masyarakatnya, indeks pembangunan manusia yang mengukur kualitas sumber daya manusia, dimana kualitas menjadi salah satu aspek penting dalam penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir upah minimum, sebagai tujuan para pencari kerja guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara teori, pengangguran disebabkan karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dipasar kerja. Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia sudah tergolong negara bermasalah dengan ketenagakerjaan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja sehingga berdampak pada tingginya jumlah penganggur (Simanjuntak,2004).

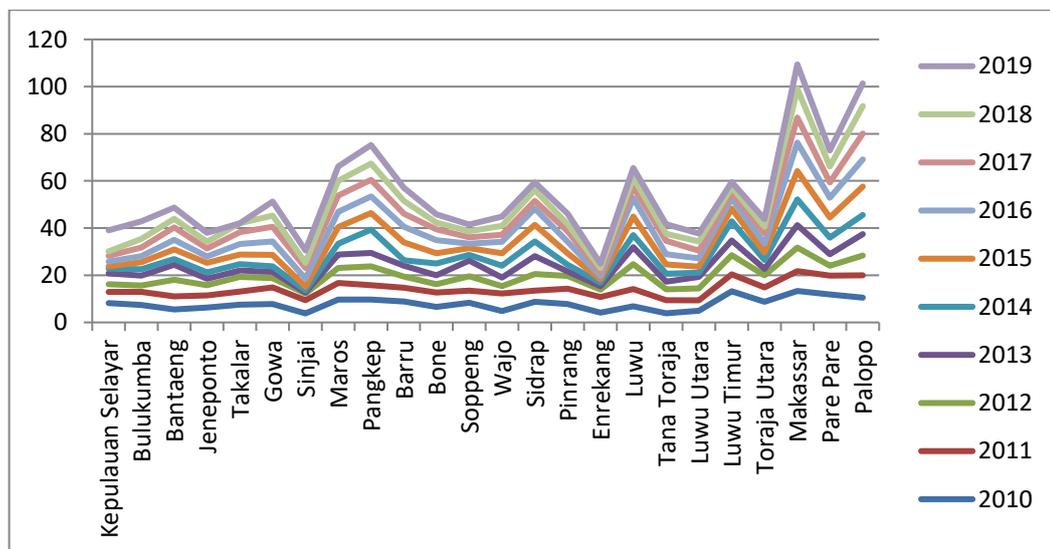
Pengangguran dapat terjadi di suatu negara tentu tidak lepas oleh pengaruh perkembangan jumlah penduduk yang ada di setiap kota dan daerahnya. Misalnya saja masalah yang dialami oleh salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Kota Makassar. Hingga saat ini tingginya angka pengangguran di Kota Makassar tentu masih menjadi isu yang menarik, sebab Kota Makassar dikenal sebagai satu-satunya kota metropolitan di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, Makassar masih menjadi kota dengan angka pengangguran tertinggi di Sulawesi Selatan yakni sebesar 10,39 persen, dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja Makassar

Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran Kota Makassar masih tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, hingga di tahun-tahun tertentu seperti pada tahun 2010,2013,2014,2015,2018,2019 Makassar masih menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sulawesi Selatan. Pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengangguran di kota Makassar masih berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar memiliki angka yang lebih tinggi jika dibandingkan angka dari tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan setiap tahunnya, serta tren tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan yang memiliki tren menurun. Selain itu tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar terus meningkat setiap tahun sejak tahun 2010 dengan angka 12.17 persen, dan setelahnya terus mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2018 kembali meningkat dengan angka sebesar 12.19 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun tersebut menurun dengan angka 5.34 persen. Meskipun pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar mengalami penurunan sebesar 1.8 persen, akan tetapi tetap menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sulawesi Selatan.

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sektor-sektor di kota ini sangat mendukung perkembangan kota, mulai dari sektor pendidikan, sosial, kesehatan, hingga infrastruktur sangat berkembang pesat demi mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu alasan Kota Makassar dinilai lebih unggul dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Akan tetapi dengan berbagai

sektor yang mendukung, Makassar masih sering menjadi Kota dengan tingkat pengangguran tertinggi. Kondisi tersebut dinilai timpang dengan perkembangan sektor yang terjadi, adanya perkembangan diberbagai sektor pemerintah tentu bersumber dari pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang digunakan untuk merancang berbagai konsep demi kesejahteraan masyarakat dan terlepas dari masalah ekonomi seperti pengangguran yang menjadi penyebab masalah-masalah ekonomi lainnya. Maka dari itu pemerintah Kota Makassar perlu merespon kondisi tersebut dengan menciptakan kebijakan yang efektif.

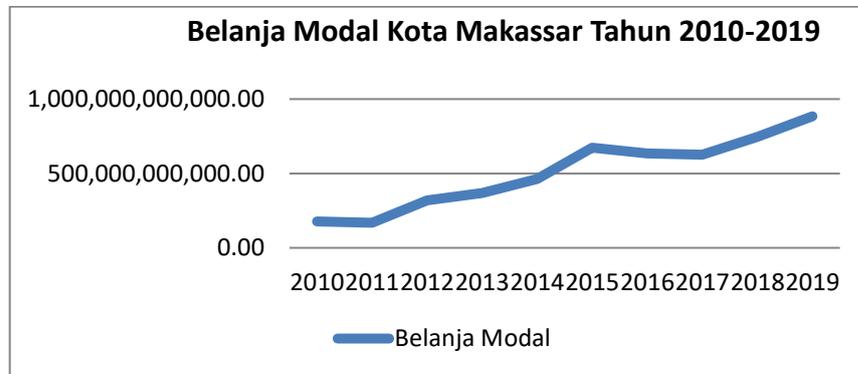
Menurut Keynes (Sukirno, 2004), perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta, maka dari itu perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, Dengan kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah daerah dapat ditingkatkan untuk memacu perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga dapat menaikkan pendapatan daerah.

Untuk memperoleh infrastruktur yang menjadi wujud dari suatu pembangunan kota terlebih dahulu dianggarkan oleh pemerintah dalam kelompok belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian dan pengadaan serta pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam penganggaran belanja modal, pemerintah juga harus memperhatikan keuangan jangka panjang terutama pemeliharaan asset tetap (Abdullah dan Halim, 2006).

Pengalokasian anggaran pada kelompok belanja modal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah, akan tetapi adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Abdullah dan Halim,2006).

Belanja modal harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja modal dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Terpenuhinya kebutuhan belanja modal, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Adanya pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi dari dunia usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat daerah setempat. Dengan pembangunan tersebut maka produktivitas dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Hal tersebut menjadi salah satu usaha pemerintah daerah dalam menekan tingkat pengangguran melalui pengalokasian belanja modal yang baik.

Grafik 1.3 Belanja Modal Kota Makassar 2010-2019



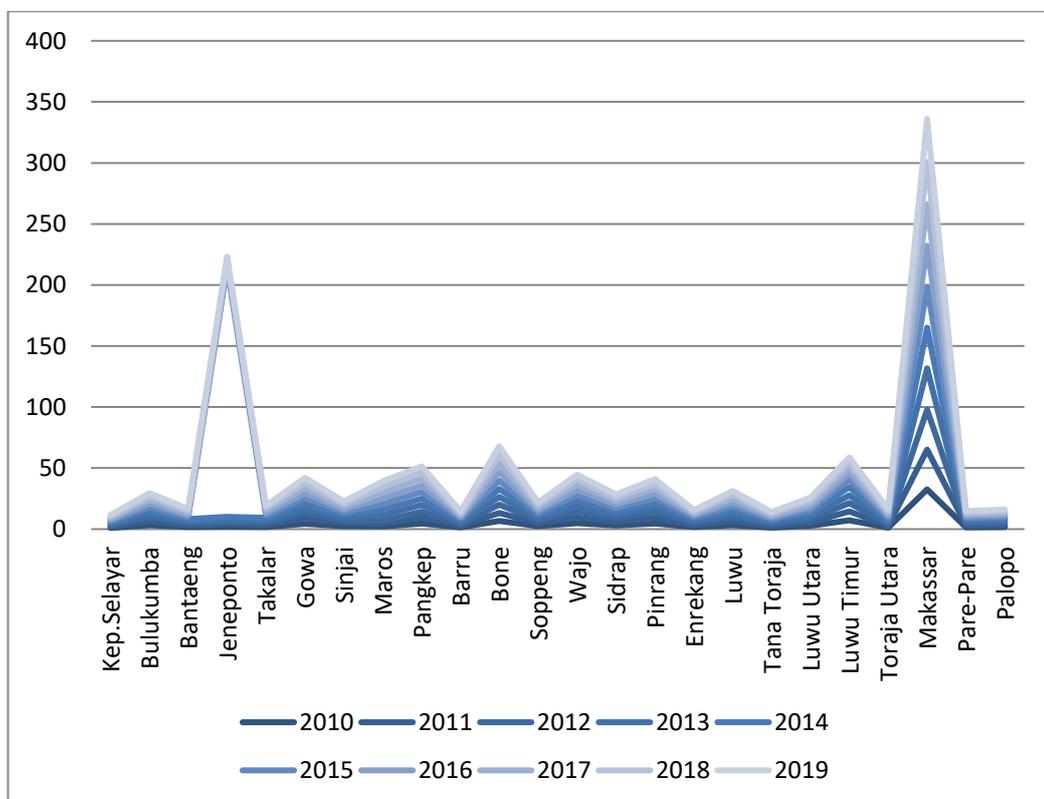
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Makassar

Grafik 1.2 menunjukkan belanja modal kota Makassar mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir, dari Rp.176,732,080,204.00 miliar di tahun 2010 menjadi Rp. 884,202,784,682.80 miliar di tahun 2019. Bandingkan dengan tingkat pengangguran yang cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir tersebut hingga masih mencapai 10 persen ke atas. Bahkan pada tahun 2018 tingkat pengangguran mencapai 12.19 persen , padahal belanja modal yang telah dilakukan pada tahun tersebut meningkat sebesar 19,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya realisasi dari pengalokasian belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan demi pengentasan pengangguran.

Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang dipengaruhi oleh proses kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan membentuk kemitraan dengan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam membangun perekonomian salah satunya dengan penciptaan lapangan pekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran. Akan tetapi pada

kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin penurunan jumlah pengangguran. Padahal peningkatan output diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Dikarenakan peningkatan output membutuhkan tambahan faktor input dan salah satu faktor input tersebut yaitu tenaga kerja. Masalah tersebut juga dialami oleh Kota Makassar hingga saat ini, dimana PDRB di Kota Makassar terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi seiring dengan peningkatan tersebut jumlah penduduk yang menganggur di Kota Makassar juga berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

Grafik 1.4. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2019 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Grafik 1.3 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019. Selain itu kontribusi Kota Makassar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya dari tahun 2010 sampai 2019, hal ini berbanding lurus dengan seringnya tingkat pengangguran Kota Makassar lebih tinggi dibanding dengan Kota/Kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2010 kontribusi Kota Makassar terhadap PDRB Sulawesi Selatan yaitu 32.56 persen dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga pada tahun 2019 mencapai 35.29 persen. Angka tersebut sangat timpang jika dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lainnya yang hanya berkontribusi sekitar 1-5 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nampak masalah yang dihadapi Kota Makassar yaitu PDRB belum mampu mengurangi tingkat pengangguran selama tahun 2010-2019 yang memiliki tren meningkat, dan kerap kali Kota Makassar menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sulawesi Selatan Sehingga perlu dipertanyakan kualitas PDRB Kota Makassar.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar 2010-2019

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-------------------------|
| 2010 | 9.83 |
| 2011 | 9.65 |
| 2012 | 9.88 |
| 2013 | 8.91 |
| 2014 | 7.39 |
| 2015 | 7.46 |
| 2016 | 7.99 |
| 2017 | 8.23 |
| 2018 | 8.38 |
| 2019 | 8.79 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar pada tahun 2010-2012 terus mengalami peningkatan yang baik meskipun menurun pada tahun 2013-2014 dengan angka 8.91 dan 7.39 persen, akan tetapi pada tahun 2015 peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar kembali mengalami peningkatan yang sangat baik hingga sebesar 8.79 persen pada tahun 2019. Adanya peningkatan ekonomi yang terus membaik pada 2015-2019 mencerminkan bahwa adanya peningkatan output yang juga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Makassar. Tetapi pada kenyataannya tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik tidak sejalan dengan tingkat pengangguran yang masih berfluktuasi. Tingkat pengangguran di Kota Makassar belum mampu teratasi dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Wahyuni (2005) dalam (Mahroji dan Nurkhasanah,2019) salah satu faktor yang juga menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran ialah tingginya pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk menjadi modal dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial khususnya di bidang ketenagakerjaan. Apabila peningkatan pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan angka yang yang mengukur pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi produktivitas yang dihasilkan seseorang (Saputra,2011) dalam (Mahroji dan Nurkhasanah,2019)

Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu berhubungan dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan, pengetahuan, dan memperoleh hidup layak maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap terjun dalam lapangan pekerjaan sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah atau daerah (Napitupulu.2007)

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar 2010-2019

| Tahun | Indeks Pembangunan Manusia |
|-------|----------------------------|
| 2010 | 77.63 |
| 2011 | 77.82 |
| 2012 | 78.47 |
| 2013 | 78.98 |
| 2014 | 79.35 |
| 2015 | 79.94 |
| 2016 | 80.53 |
| 2017 | 81.13 |
| 2018 | 81.73 |
| 2019 | 82.25 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar terus mengalami peningkatan selama tahun 2010-2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran selama tahun 2010-2019 masih terus berfluktuasi dan cenderung meningkat. Menurut penelitian Burhanuddin (2015) hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia

memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa apabila semakin tinggi angka IPM pada suatu wilayah maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya. Namun hal tersebut juga tidak sejalan dengan kondisi tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Makassar. Adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan kualitas yang dapat bersaing di dunia kerja belum mampu mengatasi tingkat pengangguran yang memiliki tren meningkat selama 2010-2019.

Selanjutnya yaitu upah minimum yang berlaku akan mendorong terjadinya peningkatan pencari kerja di Kota Makassar. Terdapat perbedaan antara upah minimum antar kota satu dan lainnya juga mempengaruhi jumlah pengangguran. Teori permintaan tenaga kerja menjelaskan bahwa apabila upah meningkat maka permintaan akan tenaga kerja berkurang. Jadi disaat upah meningkat maka pengangguran juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya disaat upah menurun maka permintaan akan tenaga kerja meningkat, jadi pada saat upah turun maka pengangguran akan turun (Simanjuntak,1998).

Masalah dalam variabel upah yaitu adanya perbedaan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang kemudian akan mendorong perusahaan untuk menambah produksi. Dengan menambahnya produksi tentu akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, akan tetapi pada kenyataannya di Kota Makassar masih banyaknya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Grafik 1.4 Upah Minimum di Kota Makassar 2010-2019



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Makassar

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa jumlah upah minimum yang berlaku di Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut tentu menjadi daya tarik pada pendatang yang ingin mencari pekerjaan di Kota Makassar, serta mempengaruhi jumlah penduduk yang menganggur di kota tersebut. Dari data upah minimum Makassar tahun 2010-2019 yang terus meningkat dan jumlah pengangguran yang cenderung meningkat dapat menjadi indikasi bahwa adanya pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Makassar.

Masalah upah yang rendah secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Keynes menyatakan bahwa masalah ketidakseimbangan pasar yang dapat menciptakan pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang

rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar seluruh sektor perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan. (Soesastro,2005)

Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
4. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap pengangguran di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengangguran di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran di Kota Makassar
4. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap pengangguran di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan pengangguran
2. Kalangan akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penulisan yang akan datang yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Menurut Sadono Sukirno (2004), pengangguran ialah suatu kondisi dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum dapat memeperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang mengakibatkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, maka akan semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Teori klasik menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik pengangguran juga terjadi dikarenakan adanya mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso,2004).

Berbeda dengan Teori Klasik, Teori Keynes mengatakan bahwa sesungguhnya pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah sehingga mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh produksi yang rendah, tetapi rendahnya konsumsi. Apabila terjadi peningkatan tenaga kerja, upah akan turun hal tersebut merugikan karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang dan berujung pada kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Tingkat pengangguran suatu wilayah dapat diukur melalui dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (Labour Force Approach) besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

- b. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labour utilization Approach)
 - 1) Bekerja penuh (employed) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu

- 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.2 Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah ialah pembelanjaan barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program-program yang diselenggarakan pemerintah untuk mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan.

Teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tiga tahapan, yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Tahap menengah pemerintah menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik dikarenakan peranan swasta yang semakin besar. Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran layanan sosial, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan masyarakat dan sebagainya (Wijayanti, 2002)

Belanja modal dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan. Menurut Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), belanja modal ialah pengeluaran yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pengalokasian anggaran untuk belanja modal mempunyai tujuan untuk menambah aset tetap pemerintah. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana publik.

Menurut Pendirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan bagan akun standar, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap, atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, tetapi untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam Buletin Teknis No.4 Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa belanja modal meliputi:

1. Belanja Tanah, yaitu pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, perataan dan pematangan tanah serta pembuatan sertifikat.

2. Belanja Peralatan dan mesin, yaitu biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor
3. Belanja Modal gedung dan bangunan, yaitu pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian/penambahan termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan /penambahan /penggantian/ peningkatan// pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja aset tetap lainnya, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Belanja modal termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan,2012).

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno,2004).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam sejarah pertumbuhan ekonomi abad XIX yang banyak berperan adalah modal dan mesin-mesin yang dihasilkan (oleh revolusi industri) yang digerakkan oleh tenaga kerja dari input modal, tenaga kerja dan pengetahuan teknik. Intensifikasi modal dan kemajuan teknologi dan inovasi untuk mengetahui hukum pendapatan yang menurun dalam rangka mencapai akumulasi modal. Beberapa pakar ekonomi telah melakukan penelitian secara terperinci tentang pertumbuhan ekonomi dalam modal serta pertumbuhan hasil produksi yang diuraikan dalam tiga sumber yang berbeda yaitu pertumbuhan dalam tenaga kerja (L), pertumbuhan dalam modal (K) dan pertumbuhan inovasi teknik (Adisasmita,2013)

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS, 2007) penetapan Gross Domestic Product (GDP) dapat dilakukan dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang produksi, GDP merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi sembilan kelompok usaha, yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air, sektor; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

2. Sudut pandang pendapatan, GDP merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.

3. Sudut pandang pengeluaran, GDP merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pengeluaran pemerintah sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu

Faktor-faktor yang dianggap sebagai sumber penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno,2004) antara lain:

1. Tanah dan kekayaan lainnya
2. Jumlah mutu penduduk dan tenaga kerja
3. Barang modal dan tingkat teknologi
4. Sistem social dan sikap masyarakat
5. Luas pasar dan sumber pertumbuhan.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran pembangunan berbasis beberapa komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung menurut data yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf, dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Nilai dari Indeks Pembangunan Manusia suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.

d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = (X1+X2+X3)/3$$

Dimana:

X1 = Angka harapan hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak

2.1.5 Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transportasi, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan,

tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS,2008).

Upah pada negara maju dapat menjadi alat seleksi dalam memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, dimana upah yang tinggi dapat mendorong produktivitas yang tinggi serta menjadi insentif bagi para pekerja (Hart,1980) dalam (Alfisyahrin,2018) berbeda dengan pendapat (Malcomson,1981) yang mengatakan bahwa para pekerja akan menuntut upah sesuai dengan tingkat produktivitasnya yang dimana dapat berada di atas maupun di bawah tingkat upah minimum.

Menurut Gilarso (2004) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan “upah” untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan. Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso,2004).

Menurut Kaufman dan Hothkiss penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh suatu negara dapat memeberikan dampak terhadap besarnya tingkat

pengangguran karena semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan akan menurunkan jumlah orang yang bekerja di suatu negara tersebut.

Mankiw (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran yaitu upah. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah akan berdampak terhadap tinggi rendahnya jumlah pengangguran yang terjadi di suatu daerah.

2.1.6 Hubungan Belanja Modal dengan Pengangguran

Menurut teori ekonomi Keynesian, anggaran menjadi salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Adanya pengeluaran pemerintah, *multiplier effect* pada sektor-sektor perekonomian yang lain dapat tercipta. *Multiplier effect* tersebut akan semakin besar apabila belanja pemerintah digunakan dalam hal-hal atau kegiatan yang produktif. Hal ini disebabkan apabila pengeluaran pemerintah di suatu daerah menciptakan *multiplier effect* yang dimana pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran. Dengan meningkatkan belanja modal dan mengurangi belanja barang dan jasa, pengangguran diharapkan dapat berkurang (Akhmad, 2013)

Belanja modal sangat berperan penting karena bermanfaat untuk jangka panjang dalam memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, dimana manfaatnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Apabila suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai maka dapat mengundang para investor untuk melakukan investasi, serta berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru untuk masyarakat (Wiraswasta dkk, 2018)

2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dikemukakan oleh Okun (1962) dalam teorinya yang dikenal dengan *Okun's Law*. Dalam studinya tentang ekonomi AS, membuktikan bahwa hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan output potensial tergantung partisipasi dalam angkatan kerja, jam kerja, serta perubahan dalam produktivitas. Landasan teoritis yang dikemukakan oleh Okun didasarkan pada fakta bahwa peningkatan tenaga kerja harus menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Okun menjelaskan bahwa tingkat pengangguran menurun di tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat di tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negatif (Soylu,2018).

The difference version (Okun, 1962) hubungan Okun yang pertama mengungkap bagaimana perubahan dalam tingkat pengangguran dari satu seperempat hingga berikutnya berpindah secara triwulan dalam output riil. Pada kesimpulannya hubungan ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan output dan perubahan dalam pengangguran yaitu, bagaimana output tumbuh bervariasi secara bersamaan dengan perubahan dalam tingkat pengangguran (Soylu,2018).

2.1.8 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran

Todaro berasumsi bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memiliki peranan dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja dalam

mengurangi jumlah pengangguran untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia yang dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga yang meningkat dan dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengangguran dapat kita lihat dari jumlah indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah (Todaro,2000) dalam (Mahroji dan Nurkhazanah,2019).

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (human capital) yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkat permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran (Mahroji dan Nurkhazanah, 2019)

Menurut Hukum Okun (Okun's Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan beberapa teori pengangguran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) dengan pengangguran mempunyai hubungan yang negatif melalui tiga

indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan pergeseran terhadap permintaan tenaga kerja. Apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya ketika nilai IPM rendah dapat meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah tersebut.

2.1.9 Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran

Brown (1988) menyatakan bahwa upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Upah yang tinggi kemudian dapat mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Sehingga perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran terjadi bukan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, tetapi informasi dari lapangan pekerjaan yang minim sehingga menyebabkan kesulitan mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai meskipun sebenarnya pemahaman tentang upah yang sesuai adalah relatif dengan kebutuhan yang ada (Oetomo, dkk. 2006). Rendah atau tingginya upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya merupakan permasalahan yang langsung menyentuh para pekerja (Mansur, dkk. 2014). Jika upah ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka pekerja dapat menolak mendapatkan upah tersebut yang akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Teori kekakuan upah (*wage rigidity*) menjeaskan bahwa gagalnya upah melakukan penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Apabila kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya

maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Para sektor usaha mengurangi pekerja mereka sehingga menimbulkan pengangguran (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014).

Terdapat dua alasan terjadinya pengangguran, pertama karena dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan yang dapat menciptakan pengangguran friksional. Kedua adalah kekakuan upah yang dimana ketika gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintannya yang menciptakan pengangguran struktural (Mankiw,2008).

2.2 Tinjauan Empiris

Zainul hasan dan Hadi Sasana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Determinant Of Youth Unemployment Rate In Asean*" di jurnal internasional penelitian ilmiah dan teknologi, Vol 9 Edisi 03. Dalam penelitiannya tersebut menggunakan metode Partial Least square (PLS) dengan variabel tingkat penganggura terbuka, PDB, Inflasi, investasi asing, populasi, dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PDB, Inflasi, investasi asing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan Indeks pembangunan manusia dan populasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Akhmad (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengangguran di Kota Makassar" di Scientia Prosiding Abdimas ISBN: 978-623-92615-0-4. Dalam

penelitiannya menggunakan metode regresi Linier Berganda dengan variable Pengangguran, Belanja Modal, Investasi dan Pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pengangguran, sementara investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

I Nyoman Astrayasa Putra dan I Nyoman Mahaendra Yasa (2019), Universitas Udayana. Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Bali” di E-Jurnal EP Unud, Vol 08 No 12, Universitas Udayana. Dalam penelitiannya tersebut menggunakan metode analisis jalur (Path analysis) untuk mengetahui hubungan antar variable, adapun variable dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran, serta berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Jihad Lukis Panjwa dan Daryono Soebgiyo dalam penelitiannya yang berjudul “Efek Peningkatan Upah Minimum” di jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 15 No 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitiannya tersebut menggunakan metode Pooled Ordinary Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) untuk mengetahui hubungan antar variable, variable dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran, UMK, PDRB, Inflasi dan Jumlah Penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat

pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Candra Gunawan Wibisono (2012) dalam *Airlangga Develeopment Journal* yang berjudul “Pengaruh Migrasi Masuk, Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif inferensial dan kuantitatif deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah migrasi masuk, pendidikan, dan upah minimum dan satu variabel dependen yaitu pengangguran terbuka. Jurnal ini menggunakan teknis analisis regresi menggunakan pendekatan fixed effect (FEM) memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah omitted variables. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu bahwa variabel migrasi, pendidikan, dan upah minimum untuk semua estimasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2009-2012. Variabel migrasi masuk menghasilkan koefisien regresi negatif dan memiliki pengaruh signifikan, variabel pendidikan menghasilkan koefisien yang positif dan tidak signifikan, dan variabel upah minimum mempunyai koefisien negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012.

Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Empiris Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan dengan Topik Penelitian

| Peneliti (Tahun) | Variabel yang Digunakan | Model Analisis | Lokasi Penelitian | Hasil Penelitian |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Zainul Hasan | 1. PDB 2. Inflasi | (Partial Least | Asia | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------|---|
| dan Hadi Sasana (2020) | 3. Investasi asing 4. Populasi 5. Indeks Pembangunan Manusia 6. Tingkat Pengangguran | Square) | | PDB, Inflasi, investasi asing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan Indeks pembangunan manusia dan populasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. |
| Akhmad (2019) | 1. Pengangguran 2. Belanja Modal 3. Investasi 4. Pengangguran | Regresi Linier Berganda | Makassar | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pengangguran, sementara investasi berpengaruh negative terhadap pengangguran. |
| I Nyoman Astrayasa Putra dan I Nyoman Mahaendra | 1. Pendapatan asli daerah 2. Belanja modal 3. Pertumbuhan ekonomi | Path analysis | Bali | pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran, serta |

| | | | | |
|--|--|---|------------|--|
| Yasa (2019), | 4. Tingkat pengangguran | | | berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran |
| Jihad Lukis Panjwa dan Daryono Soebgiyo (2014) | 1. Tingkat pengangguran 2. UMK 3. PDRB 4. Inflasi 5. Jumlah Penduduk | metode Pooled Ordinary Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) | Surakarta | Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran |
| Candra Gunawan Wibisono (2012) | 1. Upah Minimum 2. pendidikan 3. Migrasi Masuk | Fixed Effect | Jawa Timur | Variabel pendidikan menghasilkan koefisien yang positif dan tidak signifikan, dan variabel upah minimum |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | mempunyai koefisien negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur Tahu 2009-2012. |
|--|--|--|--|--|

2.3 Kerangka Konseptual

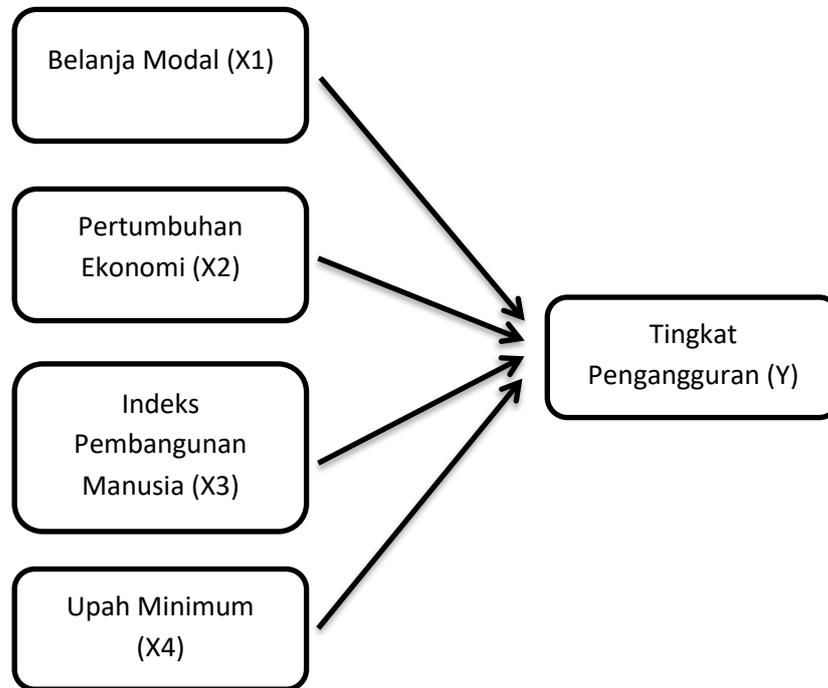
Belanja modal sebagai bentuk pengeluaran pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi asset tetap daerah, adanya asset tetap ini diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung, maka dapat meningkatkan produktivita serta akan mengundang minat investor untuk menanamkan modal, dan berujung pada penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang terus meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Karena adanya kenaikan pendapatan nasional mampu meningkatkan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mendorong peningkatan produksi. Sehingga hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran adalah negatif (Alghofari.2010)

Terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk jika tidak disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan angka yang mengukur pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi produktivitas yang dihasilkan seseorang (Saputra.2011) dalam (Mahroji dan Nurkhazanah,2019).

Tingkat upah sangat berperan penting dalam kondisi ketenagakerjaan. Adanya kenaikan tingkat upah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di sisi lain kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga produksi, dimana hal tersebut mengurangi daya beli masyarakat, hingga berujung pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan akan berpengaruh terhadap pengangguran dan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman konseptual dalam penulisan ini, digambarkan suatu kerangka yang sistematis sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap pengangguran.
2. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.
3. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap pengangguran
4. Diduga Upah Minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran